

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
PERUBAHAN AKAD UTANG PIUTANG  
(Studi Pada Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung  
Kabupaten Tanggamus)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
Syariah**

**Oleh :**

**YOZZI NOPSENDRI PUTRI**

**NPM : 1521030302**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
P1440 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG**

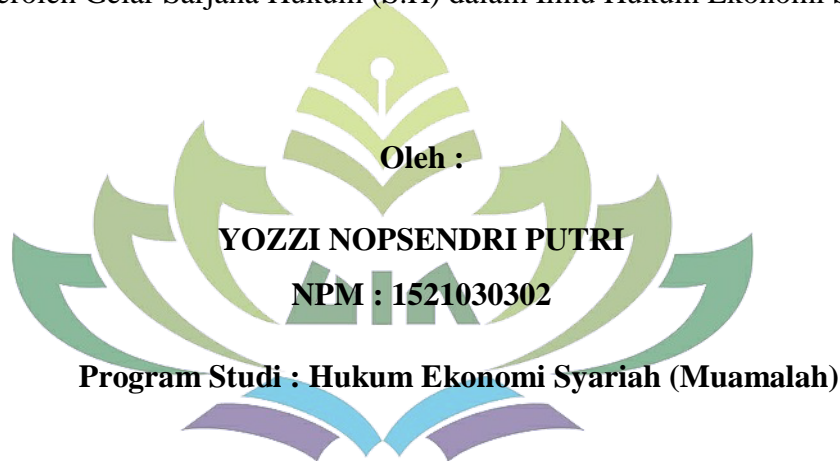
**PERUBAHAN AKAD UTANG PIUTANG**

**(Studi Pada Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung**

**Kabupaten Tanggamus)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**P1440 H / 2019 M**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yozzi Nopsendri Putri

NPM : 1521030302

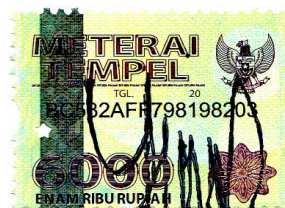
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang Piutang (Studi pada Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2019  
Penulis,



**Yozzi Nopsendri Putri**  
**NPM: 1521030302**

## ABSTRAK

Utang piutang adalah praktik yang sudah sering dilakukan dikalangan masyarakat. Hal ini merupakan wujud tolong menolong sesama manusia. Praktik utang piutang dilakukan guna memenuhi kebutuhan pihak yang berutang. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan praktik pada umumnya, hal yang terjadi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus menjaminkan kebun miliknya sebagai jaminan pelunasan utang. Jaminan yang terjadi di desa tersebut adalah pihak peminjam utang tidak dapat membayar utangnya pada saat waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan bersama. Akibat belum bisa membayar pihak yang berutang menjaminkan kebun miliknya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus. Adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan praktik perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif kualitatif*. penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data lapangan tentang perubahan akad hutang menjadi gadai yang dilakukan akibat belum bisa membayar utang pada waktu jatuh tempo. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam pengeolahan datanya dilakukan melalui *editing* dan sistematika.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik perubahan akad utang piutang pada Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus ialah perubahan akad yang dilakukan oleh pihak yang berutang akibat pada saat jatuh tempo belum bisa membayar utang maka ia menjaminkan kebun miliknya guna jaminan pelunasan utang. Perubahan yang dilakukan tersebut adalah yang mana apada awal perjanjian utang piutang itu tidak adanya jaminan yang diberikan kepada pihak pemberi utang, namun pada saat waktu jatuh tempo baru adanya jaminan, barang jaminan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemberi utang yang diperbolehkan oleh peminjam utang. Praktik tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tidak ada yang merasa tertipu bahkan terpaksa dan dipaksa. Ketentuan yang dilakukan dalam praktik ini para pihak meridhai apa yang telah dilakukan atas dasar suka sama suka, namun menurut hukum Islam perbuatan pihak pemberi utang atas dasar memanfaatkan kebun yang dijadikan sebagai barang jaminan haram hukumnya, hal ini tergolong riba sebab pihak peminjam utang terdzolimi meski ia memperbolehkan. Hal tersebut tidak sesuai menurut syara' dan hukumnya tidak diperbolehkan sebab ada dalil yang mengharamkannya.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Jln. Letkol H. Endro Suratnun Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara

Nama Mahasiswa : Yozzi Nopsendri Putri

NPM : 1521030302

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad  
Utang Piutang (Studi Kasus pada Desa Talang Jawa  
Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)**

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. M. Faisal, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**NIP. 196201111994031001**

**NIP. 196901051998031003**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Khoirudin, M.S.I.**

**NIP.197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Jln. Letkol H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Akad Utang Piutang (Studi Kasus pada Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)"** disusun oleh **Yozzi Nopsendri Putri, Npm: 1521030302** Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Senin, 22 Juli 2019**

**Tim Penguji**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H., M.E.I**

**Penguji I : Drs. Henry Iwansyah, M.A.**

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.**

**Mengetahui,**

**Fakultas Syariah**



**Khairuddin, M.H**

**06210221993031002**



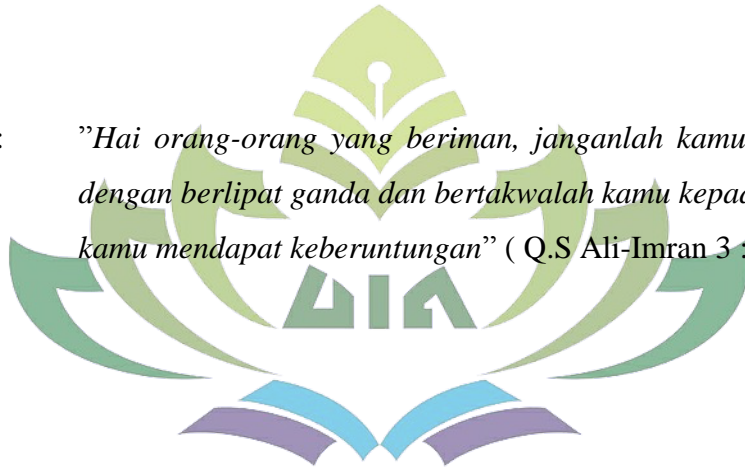
## MOTTO

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : “Setiap utang piutang yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram” (HR. Bukhairi No.3814).<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” ( Q.S Ali-Imran 3 : 130)<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup> Syaikh ‘Abdullah Al-Fauzan, *Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram*, Cetakan ketiga, (Bairut: Dar Ibnul Jauzi, 1432 H)

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1971), h.97

## PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Tiada kata lain yang terucap kepada-Mu ya Rabbi, selain kata syukur dan terimakasih atas rahmat-Mu, karunia dan kesempatan yang telah engkau berikan kepadaku untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang sangat kucintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Orang tuaku Bapak Alhadi dan Nenek serta keluarga besar Bapak Marwi yang telah mendidik, membesarkan, memotivasi, membimbing, mengarahkan dan senantiasa berdo'a, tabah, sabar dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku.
2. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*





## **RIWAYAT HIDUP**

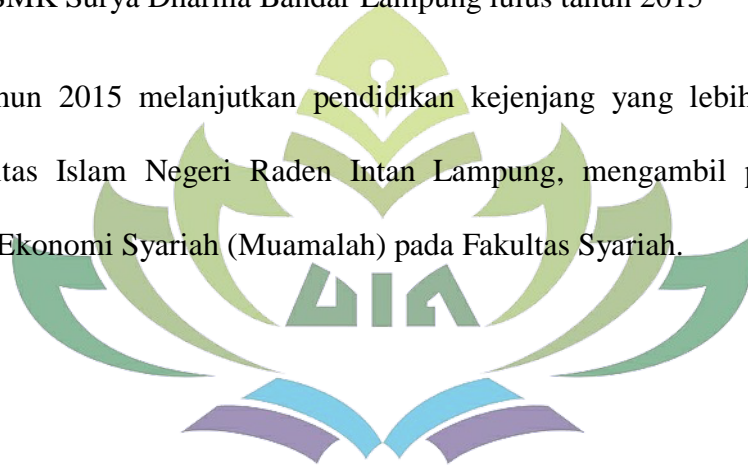
Nama : Yozzi Nopsendri Putri

Tempat tanggal lahir : Pringsewu, 13 November 1996

Riwayat Pendidikan dimulai dari:

1. SD Negeri 1 Gunung Megang lulus tahun 2009
2. SMP Negeri 28 Bandar Lampung lulus tahun 2012
3. SMK Surya Dharma Bandar Lampung lulus tahun 2015

Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang Piutang (studi pada Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus)” dapat diselesaikan. Salawat serta saran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikut yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, taklupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci diungkapkan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Khoirudin, M.S.I. dan Juhrotul Khulwah M.Si Selaku sekretaris jurusan Mu’amalah.
3. Prof. Dr. H. M. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Segenap guruku di SD, SMP dan SMA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
7. Bapak, Ibu, Adik saya Yozza Nopsendra Putra dan keluarga besar tercinta yang selalu memberikan suport, terima kasih atas segala pengorbanan yang telah dilakukan.
8. Terimakasih kepada sahabat lamaku yang selalu ada waktu-waktu yang tidak terduga sampai detik ini Anisa Gustina Putri, Ade Ayu Hani Ptatiwi, Lisca Dwi Astari.
9. Sahabat-sahabat terbaiku selama menempuh kuliah, Diyan Puspita Sari, Annisa Dwi Safitri, Siti Rosidah, Kholifatul Azkiya, Melinda, Dwi Fatmawati, dan Teman-Teman Muamalah D, Teman-Teman KKN dan PPS yang telah menemani dalam suka dan duka mengarungi dinamika kehidupan



kampus, menemani, mendampingi, memberi do'a, semangat dan dukungan, tak henti-hentinya membantu saat suka maupun duka, tertawa maupun menangis, memberikan kehidupan baru, keluarga baru, pelajaran baru dan segalanya yang telah di diterima penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan membuat masa-masa kuliah lebih berwarna dan berarti.

10. Keluarga Besar AMPIBI yang telah memberikan motivasi, dukungan serta telah menjadi keluarga di Kampus tercinta kita ini.
11. Almamater tercinta

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu diharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.



Bandar Lampung, 20 Juli 2019

Penulis,

Yozzi Nopsendri Putri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	1
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah .....	3
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Akad .....	13
1. Pengertian akad.....	13
2. Dasar hukum akad .....	16
3. Rukun dan syarat akad.....	17
4. Macam-macam akad.....	26
5. Pembatalan dan berakhirnya akad .....	29
6. Prinsip-prinsip akad dalam hukum Islam .....	34
B. Perjanjian Utang Piutang.....	<b>37</b>
1. Pengertian perjanjian utang piutang.....	37
2. Dasar hukum perjanjian utang piutang. ....	41
3. Rukun dan syarat perjanjian utang piutang.....	46
4. Etika dalam perjanjian utang piutang.....	49
5. Manfaat perjanjian utang piutang.....	51
6. Berakhirnya perjanjian utang piutang. ....	52

C. Jaminan Menurut Hukum Islam.....	53
1. Pengertian jaminan dalam hukum Islam.....	53
2. Dasar hukum jaminan .....	54
3. Rukun dan Syarat jaminan .....	55
4. Jaminan dalam perjanjian utang piutang.....	56
5. Memanfaatkan barang jaminan menurut Islam.....	59
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	61
1. Sejarah berdirinya Desa Talang Jawa.....	61
2. Letak geografis Desa Talng Jawa .....	62
3. Keadaan Demografis Desa Talang Jawa .....	65
B. Pelaksanaan Perubahan Akad Utang Piutang Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung.....	67
C. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung.....	70
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A. Praktik Perubahan Akad Utang Piutang di Desa Talang Jawa Kacamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang Piutang di Desa Talang Jawa Kacamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka sebelumnya penulis akan menerangkan kata-kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Tinjauan**, adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. **Hukum Islam**, ialah seluruh aturan yang berisi hukum-hukum Syara' yang bersifat mendalam, yang berhubungan dengan perilaku manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-qur'an dan Hadist) dan Dalil-dalil Syara' lainnya (berbagai metode *ijtihad*).<sup>2</sup>
3. **Perubahan**, merupakan hal (keadaan) berubah, peralihan, pertukaran.<sup>3</sup>
4. **Akad**, secara bahasa berarti ikatan, keputusan, atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h.1470.

<sup>2</sup>Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2016), h.15.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, h.1514.

<sup>4</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.35.

- 5. Utang Piutang**, yaitu sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan judul yang dimaksud adalah guna meninjau suatu perjanjian menurut hukum Islam yang terjadi akibat adanya perubahan akad utang piutang. Perjanjian adalah suatu ikatan antara dua orang atau lebih yang mengakibatkan adanya suatu perikatan. Namun menurut hukum Islam dapat meninjau mengenai perubahan akad terutama akad hutang piutang.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan objektif**

- a. Utang piutang ialah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang memerlukan uang maupun berupa barang dengan jumlah tertentu dalam transaksi yang sudah disepakati para pihak. Pihak yang berhutang tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang atau barang yang diutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang sudah disepakati.
- b. Dalam praktiknya sistem utang piutang yang digunakan masyarakat di Desa Talang Jawa tidak terdapat jaminan yang diberikan kepada pihak yang memberikan utang.

---

<sup>5</sup>Ahmad Irham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), h.877.



## 2. Alasan subjektif

- a. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktik mu'amalah yang sementara tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diteliti dan diketahui status hukumnya.
- b. Judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- c. Penelitian didukung dengan literatur yang memadai sehingga dimungkinkan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

## C. Latar belakang

Salah satu bagian dari ilmu *fiqh* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta urusan keduniawian adalah *fiqh muamalah*. Sebagaimana contoh, tidak semua orang memiliki barang yang ia butuhkan, sedangkan orang lain memiliki barang tersebut, dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan terjadi suatu transaksi. Kesepakatan tersebut timbul apabila kedua belah pihak telah terikat satu sama lain dalam suatu ijab dan kabul dan disebut dengan akad.

Akad merupakan jama' dari *al'uqud* yang artinya ikatan atau mengikat. Semua perikatan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Akad memiliki posisi di peranan yang sangat penting dalam berbagai persoalan

muamalah, akad dapat menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu transaksi. Dengan adanya akad sebuah kepemilikan bisa berpindah dari kepemilikan seseorang kepada pihak lain.

Kebutuhan hidup manusia dalam perekonomian semakin hari semakin meningkat, produktifitasnya pun semakin bertambah seiring dengan kebutuhan yang kian mendorong manusia untuk berbuat lebih dalam mencukupi kebutuhannya, oleh karena itu tidak heran apabila dalam mencukupi segala kebutuhan seseorang membutuhkan pinjaman atau disebut dengan berhutang. Hutang adalah memberikan sesuatu atau pinjaman yang memiliki nilai yang menjadi hak milik pemberi pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama.

Dalam kajian *fiqh* utang piutang disebut dengan *qardh*, secara bahasa *qiradh* merupakan harta yang diberikan kepada orang yang akan menggunkannya dan gantinya dikembalikan dikemudian hari sesuai waktu yang telah disepakati.<sup>6</sup> Hukum hutang piutang sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245 berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan

---

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.331.



*lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*<sup>7</sup>

Jaminan menurut Islam disebut *ar-rahn* yang artinya adalah menjaminkan utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap hutang. Praktik jaminan yang dilakukan di Desa tersebut adalah dengan perjanjian awal yang tidak ada jaminanan sehingga pada saat jatuh tempo jaminan baru muncul.

Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kecamatan Tanggamus praktik utang piutang tidak selamanya sesuai dengan kesepakatan, dalam praktiknya pihak debitur tidak bisa membayar pada tempo yang telah ditentukan maka ia menjaminakan kebun miliknya sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditur. Dalam praktik ini timbulnya jaminan pada waktu jatuh tempo tepatnya pada saat tidak dapat membayar utang sebab diawal perjanjian utang piutang tidak ada jaminan. Oleh sebab itu terjadinya perubahan akad utang piutang yang terjadi akibat jaminan sebagai pelunasan utang.

Berdasarkan uraian tersebut maka masalah ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Alasannya antara lain: masalah ini sudah sering terjadi di dalam pelaksanaanya, akad utang piutang sudah menjadi alat bantu untuk mendapatkan dana dengan niat saling tolong menolong, namun akad tersebut

---

<sup>7</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Toha Putra Semarang ,1971), h. 60

dapat berubah akibat adanya jaminan pada waktu jatuh tempo sehingga belum ada penelitian yang mengkaji permasalahan ini terutama di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

#### **D. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang perkara yang sudah jelaskan, hingga akan dirumuskan beberapa pokok perkara yang akan dijadikan kajian dalam observasi ini, adapun pokok pembahasan tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik perubahan akad utang piutang di Deesa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupatenn Tangamus?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam setiap melakukan penelitian pada dasarnya mempunyai tujuan dan fungsi khusus yang ingin diperoleh baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam kemaslahatan produk penelitian tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan praktik perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.



- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik hutang-piutang dan gadai terutama mengenai perubahan akad dalam satu transaksi menurut hukum Islam.
- b. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## F. Metode Penelitian

Data ini diperoleh penulis melalui penelitian secara langsung tentang perubahan akad hutang menjadi gadai dalam satu transaksi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian

Persoalan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan secara melihat langsung tempat yang telah dijadikan objek penelitian

di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif yakni sesuatu penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan sesuatu yang menjadi objek, gejala dan kelompok tertentu dengan metode observasi. Pada penelitian ini akan di jelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan akad utang piutang.

## 2. Data Dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat penting memegang erat peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan sumbernya data dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>8</sup> Data tersebut bisa diperoleh dari responden utama yaitu orang yang terlibat dalam perubahan akad.

---

<sup>8</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 57.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>9</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.<sup>10</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus yang melakukan perubahan akad hutang menjadi gadai dalam satu transaksi berjumlah 4 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian atau seluruh populasi yang diteliti, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>11</sup> Menurut Suharsimi Arikanto jika subjeknya tidak lebih dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi, maka semua populasi dijadikan sampel.<sup>12</sup> Penelitian tersebut disebut dengan penelitian populasi, jadi yang diteliti adalah 4 warga di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h.58.

<sup>10</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), h.79.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Wawancara

*Wawancara* merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.<sup>13</sup> melakukan wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terhadap para narasumber. Yakni dengan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pihak yang melakukan perubahan akad dalam satu transaksi khususnya akad hutang menjadi gadai di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus.

##### b. Dokumentasi

*Dokumentasi* yakni memilih data tentang beberapa hal atau variabel berbentuk catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Metode tersebut dimanfaatkan untuk mendapat atau mengumpulkan data melalui sistem yang tidak langsung atau turun

---

<sup>13</sup>Moh. Pabundu Tika, *Op.Cit.*, h.62.

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 15.

langsung terhadap objek penelitian di lapangan untuk memperoleh bukti terkait kejadian di lapangan untuk materi membuat laporan.

## 5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

### 1. Metode Pengolahan Data

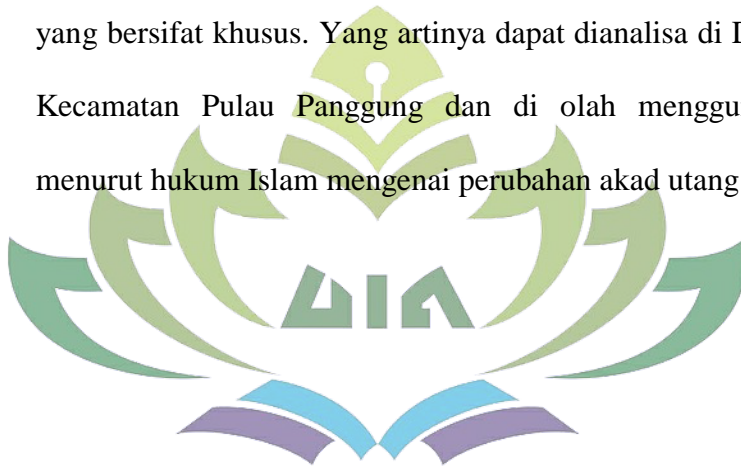
Pengolahan data dapat berarti menimbang dan menyaring data, dipilih dengan teliti dan secara hati-hati data yang sesuai dan benar dengan berkaitan dalam masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Data yang diolah bisa bermakna menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. metode pengelolaan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. *Editting* data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.
- b. Sistematika yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Berdasarkan pokok bahasan dan sub bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

### 2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang

penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan dan dokumentasi sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik perubahan akad utang piutang menurut hukum Islam yang akan dibahas berdasarkan teori utang piutang dan jaminan. Yakni dengan malakukan metode deduktif yang menganalisa suatu data yang bersifat umum kemudian diolah untuk memperoleh data yang bersifat khusus. Yang artinya dapat dianalisa di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung dan di olah menggunakan teori-teori menurut hukum Islam mengenai perubahan akad utang piutang.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad

Sebagian kaidah *muamalah* dalam Agama yaitu asas keridhaan semua pihak yang melaksanakan akad. Rela ialah persoalan hati yang sulit ditakar kebenarannya, maka pelaksanaan dari suka sama suka itu direalisasikan kedalam akad. Akad pun menjadi suatu cara dalam pemilihan sesuatu.<sup>15</sup>

Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontrak.<sup>16</sup> Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan.

Secara khusus akad berarti kesetara antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Dan menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad adalah

---

<sup>15</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Wali 2017) h. 45

<sup>16</sup>Abdur Rohman, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing*, (Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember 2016), h.180

kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>17</sup>

Istilah perjanjian di Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada kaitannya dengan orang lain. Kesepakatan yang dibuat satu pihak tidak perlu persetujuan dari pihak lain, baik setuju ataupun tidak, maka tidak akan pengaruh kepada janji yang di buat oleh pihak tersebut, seperti yang dijelaskan di surat Ali-Imran:76 bahwasanya janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>18</sup>

Dalam kalangan usaha, perjanjian mempunyai peran berharga karena keberlangsungan kegiatan bisnis kedepannya akan tergantung seberapa baik dan rinci akan yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad ialah kesepakatan yang mengikat para pihak untuk sekarang dan yang akan datang, karena pemilihan akad yang mencerminkan seberapa besar resiko dan keuntungan bagi kedua belah pihak.<sup>19</sup>

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan

---

<sup>17</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2011) h. 72

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali 2014) h. 45

<sup>19</sup>Eka Nuraini Rachmawati Dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Al-Adalah, Vol.12, No.4 (Desember 2015), h. 785.

mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama, akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterikatan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

### 1. Berdasarkan Al-Qur'an

#### 1) Q.S Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu . (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”<sup>21</sup>

#### 2) Q.S Ali-Imran (3) : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧٦

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”<sup>22</sup>

#### 3) An-Nisa' (4) : 29

<sup>20</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007) h. 69

<sup>21</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*(Jakarta: Toha Putra Semarang ,1971), h. 156

<sup>22</sup>*Ibid.*, h.88



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." <sup>23</sup>

## 2. Berdasarkan kaidah fiqh

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya apa yang diakadkan" <sup>24</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut, keridhaan pada negosiasi ekonomi dan bisnis termasuk kaidah penting. Maka, negosiasi dinyatakan benar jika dilandaskan kepada keridhaan para pihak yang bertransaksi ditandai dengan kesepakatan dalam ijab dan kabul.

## 3. Rukun Dan Syarat Akad

### a. Rukun akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang

<sup>23</sup> *Ibid.*, h.122

<sup>24</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed.1, cet.3, h.130

membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun yang membentuknya.

Setelah diketahuii bahwa akad ialah suatu tindakan yang terencana dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan masing-masing, maka bagi kedua belah pihak diwujudkan oleh akad. Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki *haq* (*aqid* asli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki *haq*.
- 2) *Ma'qud* alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan akad.
- 4) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shighat* atau ijab kabul adalah:

- 1) Harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak arti.
- 2) Harus sesuai antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafadz*.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Terdapat perbandingan pendapat ulama *fiqh* dalam memutuskan rukun akad. Jumhur ulama *fiqh* menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas:

- 1) Pernyataan demi mengikatkan diri (*shighat al-aqd*)
- 2) Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
- 3) Objek akad (*al-ma'qud' alaihi*)

Ulama Hanafiyah beranggapan bahwa rukun akad itu cuma satu, yaitu *shighat al-aqd* (ijab dan kabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu ialah suatu dasar yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada di luar esensi akad.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.46

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama 2007) h. 99



Dalam istilah *ushul fiqh*, orang yang mempunyai keahlian berbicara disebut dengan *Ahliyat al-ada*, akan tetapi ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum. Menurut Ahmad Azhar Basyir ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

1) Gila

Bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras, maka tidak sah nya akad tersebut.

2) Rusak akal

Dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bias disamakan dengan pengertian gila.

3) Mabuk

Seseorang dalam keadaan sedang mabuk tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak dikarenakan orang tersebut dalam pengaruh alkohol yang memabukan.

4) Tidur

---

<sup>27</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat ( Hukum Perdata Islam)* Cet ke-3 (Jakarta : UII Pers 2009) h. 32

Dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar ataupun sehat sepenuhnya, bila orang lain dalam keadaan tidur maka batal akad kontrak tersebut.

5) Pingsan

Sama dengan orang yang sedang tertidur, seseorang yang sedang pingsan tidak boleh melakukan akad, dikarenakan dirinya sedang tidak sadar.

6) Pemboros

Seseorang masuk kriteria pemboros tidak bisa melakukan akad kontrak dikarenakan membahayakan dirinya dan para pihak yang melakukan akad, ditakutkan seseorang yang pemboros melakukan penyalahgunaan akad.

7) Dungu

Seseorang yang akalnya harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memiliki pikiran yang jernih dan dalam keadaan sadar, bila pelaku akad dalam keadaan dungu maka akadnya tidak sah, karena akan merugikan dirinya maupun para pihak yang berakad.

8) Utang

Orang yang terlalu banyak utang akan pihak yang berakad, ditakutkan penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh orang yang banyak hutang.

Apabila salah satu pihak yang berakad mengalami hal-hal yang terhalang seperti yang sudah dijelaskan maka perjanjian yang akan dibuat tidak dapat dilanjutkan atau dilaksanakan.

#### **b. Syarat Akad**

Setiap pembentukan akad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan wujudnya, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam yaitu:

- 1) Syarat-syarat bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam suatu transaksi (jual beli) ataupun dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum dapat dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang melaksanakan transaksi dapat berperan, namun tidak untuk orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) sebab boros atau yang lainnya.
- 2) Sebagai objek perjanjian dapat mendapatkan hukumannya.
- 3) Perjanjian diizinkan hukum Islam, apabila dilaksanakan oleh pihak yang memiliki hak walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

- 4) Akad dapat menyampaikan faidah, tidaklah benar apabila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang ber ijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 6) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>28</sup>

Menurut Mardani dalam buku *fiqh ekonomi syariah* menjelaskan syarat adanya sebuah akad yaitu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara'. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad yaitu *aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud* (benda-benda yang diakadkan), *Maudhu' al'aqd* (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), *Shighat al'aqd* (ijab dan kabul) tujuan pokok akad dan kesepakatan.
- 2) Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah paksaan, penipuan, dan penyamaran.
- 3) Akad itu harus bermanfaat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Hendi Suhendi. *Op.Cit.*, h.49

<sup>29</sup>Mardani. *Op.Cit.*, h. 74



Menurut Nasrun Haroen syarat-syarat umum suatu akad itu adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak-pihak yang melaksanakan akad itu telah cakap berbuat hukum (*mukallaf*) atau bila objek akad itu termasuk milik orang yang tidak atau belum cakap berbuat hukum, jika harus dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu suatu akad yang dilaksanakan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz* secara langsung hukumnya tidak benar.
- 2) Objek akad itu diakui oleh syara'. Untuk obyek akad ini disyaratkan pula berbentuk harta, dimiliki oleh seseorang, dan bernilai harga menurut syara'. Oleh karena, itu jika obyek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti *khamar* (minuman keras).
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh *nash* (ayat atau hadist) syara'. Atas dasar syarat ini seorang wali (pengelola anak kecil) tidak boleh menghibahkan harta anak kecil itu. Alasannya adalah melakukan suatu akad yang sifatnya menolong semata (tanpa imbalan) terhadap harta anak kecil tidak diperbolehkan syara'. Oleh sebab itu apabila wali menghibahkan harta anak kecil yang berada dibawah pengampuannya, maka akad itu batal menurut syara'.<sup>30</sup>

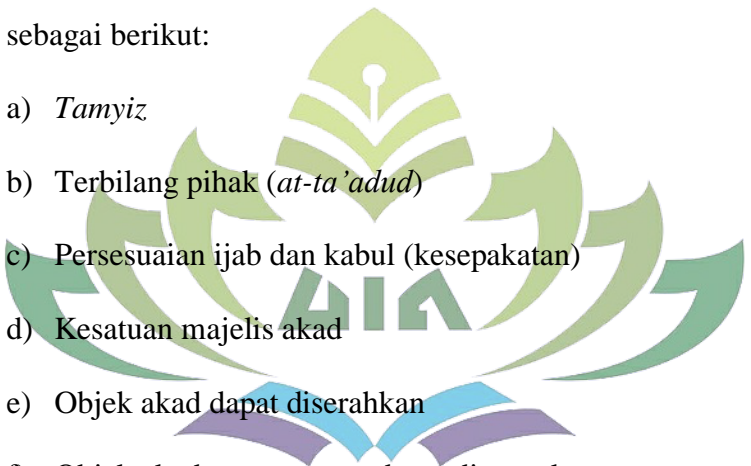
---

<sup>30</sup>Nasrun Haroen. *Op.Cit.*, h.101

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat keabsahan akad (*syuruth ash-Shihhah*), syarat berlakunya akibat hukum (*syuruth an-nafadz*) dan syarat mengikatnya akad (*syarthul-Luzum*).

#### 1) Syarat terbentuknya akad

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun disebut dengan syarat terbentuknya akad, syarat ini terbagai menjadi delapan macam, yaitu sebagai berikut:

- 
- a) *Tamyiz*
  - b) Terbilang pihak (*at-ta'adud*)
  - c) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
  - d) Kesatuan majelis akad
  - e) Objek akad dapat diserahkan
  - f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
  - g) Objek akad dapat ditransaksikan
  - h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-nash*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis seperti apapun. akad semacam ini disebut disebut akad *batil*. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *batil* sebagai akad yang menurut syara' tidak sah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat

terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi, maka akad sudah terbentuk.

2) Syarat-syarat keabsahan akad

- a) Para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu *tamyiz* dan terbilang pihak tidak memerlukan sifat penyempurnaan.
- b) Penyertaan kehendak, dengan dua syaratnya juga tidak memerlukan sifat penyempurnaan.
- c) Objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifa-sifat sebagai unsur penyempurnaan. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan unsur penyempurnaan, yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*.

3) Syarat berlakunya akibat hukum

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad.
- b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakuka

4) Syarat mengikatnya akad

Akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah

mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.<sup>31</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad

Akad terbagi pada beberapa macam pandangan yang berbeda yaitu:

a. Dilihat dari sifat akad secara syara'

- 1) *Aqad shahih*, yaitu akad yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syarat menurut syara'. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian dan mengikat secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad, akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat berlaku.

Akad shahih menurut Hanafiyah dan Malikiyah terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a) Akad *nafiz*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut.
- b) Akad *mauquf*, yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut, misalnya seorang anak kecil yang *mumayiz*.<sup>32</sup>

- 2) Akad *ghairu shahih*, yaitu sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dasar atau akad. Akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak

---

<sup>31</sup>Syamsul Anwar. *Op.Cit.*, h. 97

<sup>32</sup>Nasrun Haroen. *Op.Cit.*, h.106



mengikat pihak-pihak jika terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya.

Akad *ghairu shahih* dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a) Akad *bathil* adalah ada larangan dari syara' ialah tidak melengkapi sebagian rukunnya. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b) Akad *fasid* adalah akad yang sifatnya tidak jelas akan tetapi pada dasarnya di syariatkan. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan dijual, atau tidak disebut brand kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

b. Dilihat dari keabsahan menurut syara'

- 1) Akad *musammah*, yaitu yang ditetapkan nama-namanya oleh syara' dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah*, dan lain sebagainya.

- 2) Akad *ghairu musammah*, yaitu akad yang tidak dijelaskan hukum-hukumnya dan tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara', akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti akad *istishna bai' al-wafa'*.

c. Dilihat dari tujuan akad terbagi menjadi:

- 1) *Al-tamlikat* ialah akad yang bertujuan untuk mempunyai sesuatu, baik barang atau manfaatnya, contohnya, jual beli dan *ijarah*.
- 2) *Al-isqathat*, ialah akad yang bertujuan membatalkan hak-hak, seperti *thalaq* dan pemaafan *qisha*
- 3) *Al-athlaqat*, ialah akad bertujuan memberikan kewenangan kepada orang lain untuk mengerjakan pekerjaan, seperti *wakalah*
- 4) *Al-taqyidat*, ialah terhalangnya seseorang melaksanakan transaksi akibat kehilangan kecakapan seperti *hajru* atau menahan seseorang untuk melaksanakan transaksi karena gila dan bodoh.
- 5) *Al-tausiqat*, adalah akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang, seperti *kafalah*, *hiwalah*, dan *rahn*.

d. Dilihat dari sifat benda, akad terbagi:

- 1) Akad *ainiyah*, ialah akad agar menjadi sempurna harus menyertakan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, *ariyah*, *wadi'ah*, *rah*, dan *qiradh*.

2) Akad *ghairu ainiyah*, yaitu akad yang hanya semat-mata untuk akad.

Akad ini dicukupkan dengan tetapnya shigat akad, seperti akad *amanah*.

e. Dilihat dari hubungan pengaruh akad, akad terbagi menjadi:

1) Akad *munjaz*, ialah akad yang didasarkan dari shigat tidak dikaitkan dengan syarat dan masa yang akan datang, seperti perkataan “ saya jual tanah ini kepada engkau seharga sekian”

2) Akad didasarkan pada masa yang akan datang, seperti perkataan “ saya akan menyewakan rumah ini kepada engkau selama satu tahun pada awal bulan depan”

3) Akad yang dihubungkan dengan syarat, yaitu akad yang menghubungkan dengan urusan lain dengan satu syarat, seperti “ jika kamu bepergian nanti kamu menjadi wakilku”<sup>33</sup>

Menurut uraian di atas bawasannya macam-macam akad dapat dilihat dari sifat akad secara syara’, keabsahan menurut syara’, tujuan akad, sifat benda serta hubungan pengaruh akad.

## 5. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad

a. Pembatalan Akad

1) Akad *bathil*

Akad *bathil*, yaitu akad yang tidak melengkapi salah satu rukunnya atau terdapat larangan langsung dari syara’. Ahli-ahli

---

<sup>33</sup>Rozalinda, *Op.Cit.* h.59

hukum Hanafi mengartikan akad bathil secara ringkas sebagai akad yang secara syara' tidak sah pokok serta sifatnya.

Hukum akad *bathil*, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad yaitu sebagai berikut:

- a. Akad tersebut tidak ada wujudnya secara syari' (secara syari' tidak pernah dianggap ada) dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- b. Apabila dilaksanakan oleh para pihak, akad bathil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad bathil tersebut.
- c. Akad *bathil* tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad sebenarnya tidak secara syari'.
- d. Akad *bathil* tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e. Ketentuan waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan

## 2) Akad *fasid*

Akad *fasid* ialah, akad yang pada hakikatnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak pasti.

Hukum akad *fasid*:



a) Pendapat Jumhur

Jumhur ahli hukum Islam, Maliki, syafi'i dan Hambali, tidak membedakan antara akad *bathil* dan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

b) Pandangan Mazhab Hanafi

Teori akad *fasid* merupakan kekhususan mazhab Hanafi, yang membedakan akad *bathil* dan akad *fasid*. Akad *bathil* sama sekali tidak ada wujudnya dan tidak pernah terbentuk karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syarat terbentuknya akad.

3) Akad *maukuf*

Akad *maukuf*, ialah akad yang dilaksanakan seseorang yang mampu bertindak hukum, namun ia tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Hukum akad *maukuf*, sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hukum akad *maukuf* itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan sehingga akad itu dibenarkan atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui).<sup>34</sup>

Menurut Rachmat Syafe'i pembatalan akad dapat dilihat dari batalnya ijab, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>34</sup>Syamsul Anwar. *Op.Cit.*, h.245

- a) pengucapan ijab menarik pernyataannya sebelum kabul
- b) adanya penolakan dari salah satu pihak yang berakad.
- c) berakhirnya tempat akad, yaitu kedua belah pihak yang berakad berpisah.
- d) rusaknya sesuatu yang sedang dijadikan akad.<sup>35</sup>

#### **b. Berakhirnya Akad**

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*) akad dipandang berakhir apabila utang telah dibayar.<sup>36</sup>

Berakhirnya perjanjian yang mengikat antara yang melakukan akad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak berpengaruh dengan anak yang lahir dalam keadaan meninggal. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah, namun kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad tersebut dirusak dengan kemauan sendiri disebut *fasakh* dan apabila akad rusak disebabkan yang datang yang tidak kita kehendaki dinamakan *infasakh*.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2000), h. 53

<sup>36</sup>Mardani. *Op.Cit.*, h.99

<sup>37</sup>Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra 2011), h.89

Para ulama menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1) Akad itu memiliki tenggang waktu, jika sudah mencapai batas tenggang waktu maka akad itu akan berakhir.
- 2) Apabila akad itu bersifat tidak mengikat, maka akad itu dapat dibatalkan.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat berakhir, jika:
  - a) Jual beli itu *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
  - b) Berlakunya khiyar syarat dan *khiyar* aib
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - d) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna
- 4) Jika ada pihak yang meninggal dunia, dalam hubungan ini para Ulama Fiqh mengatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.<sup>38</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai pembatalan dan berakhirnya akad itu terjadi akibat adanya kecacatan atau terputusnya akad dan akad berakhir disebabkan oleh kehendak kedua belah pihak yang berakad.

---

<sup>38</sup>Nasrun Haroen. *Op.Cit.*, h.108

## 6. Prinsip-Prinsip Akad dalam Hukum Islam

Hukum Islam telah menegaskan prinsip-prinsip akad yang berakibat kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Prinsip-prinsip akad dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

### a. Prinsip kebebasan berakad (*Al-Hurriyah*)

Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dalam artian para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Prinsip kebebasan berakad didalam hukum Islam di batasi oleh ketentuan syariah Islam dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan kekhilafan dan penipuan.

### b. Prinsip persamaan atau kesetaraan (*Musawamah*)

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Oleh karena itu dilarang penentuan isi akad oleh sepihak atau berdasarkan kemauan pihak yang kuat posisinya atau hanya salah satu pihak.



c. Keadilan (*Al-Adalah*)

Adil adalah memberikan atau meletakkan sesuatu dengan proposinya atau tempatnya. Keadilan dalam Islam mendapatkan penekanan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Atas dasar prinsip keadilan para pihak dalam pelaksanaan akad dituntut untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan. Keadilan juga menuntut para pihak menerima hak dan melaksanakan kewajiban secara berimbang sesuai prestasi dan kompensasinya. Disamping itu pelaksanaan akad harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Kerelaan (*Al-Ridho*)

Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Oleh karena itu prinsip ini harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur keterpaksaan, tekanan dan penipuan.

e. Kebenarana dan kejujuran (*As-Shidq*)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk proses perjanjian akad tersebut. Maka

dengan kata lain dalam suatu perjanjian atau suatu transaksi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, haruslah jujur dalam berakad tidak adanya unsur penipuan ataupun keterpaksaan pada salah satu pihak maupun para pihak.

f. Tertulis (*Al-Kitabbah*).

Bahwa setiap perjanjian kehendak dibuat secara tertulis. Hal ini penting dilakukan untuk kepentingan pembuktian jika kemudian hari terjadi sengketa. Dalam Islam ketika seseorang membuat akad atau perjanjian dengan pihak lainnya, dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tulisan dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting khususnya bagi akad-akad yang membutuhkan pengaturan yang kompleks seperti akad di bidang perdagangan dan sebagainya. Pembuatan perjanjian secara tertulis juga akan sangat bermanfaat ketika di kemudian hari timbul sengketa terhadap alat bukti tertulis mengenai sengketa yang terjadi.<sup>39</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya prinsip-prinsip dalam berakad sangatlah penting untuk diperhatikan untuk menghindari adanya penipuan dalam suatu perjanjian. Oleh sebab dalam suatu perjanjian harus disertakan saksi dan perjanjian bentuk tertulis guna menghindari unsur penipuan oleh para pihak yang berakad. Dan prinsip dalam berakad itu dapat dilihat dari kejujuran para pihak yang berakad,

---

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, h.65

kerelaan para pihak, keadilan serta keabsahan dalam berakad. Hal tersebut harus diperhatikan oleh para pihak saat akad melakukan transaksi suatu perjanjian.

## **B. Perjanjian Utang Piutang**

### **1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang**

Perjanjian dalam arti luas, menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPdt bahwa:

*“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”*

Perjanjian dalam arti sempit dapat dirumuskan sebagai berikut:

*“perjanjian adalah persetujuan dengan nama dua belah pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan”<sup>40</sup>*

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam bab Ke-XIII buku KUHPdt, dalam pasal 1754 KUHPdt yang secara jelas menyebutkan bahwa:

*“perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat*

---

<sup>40</sup>R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: PT Balai Pustaka, 2017), h. 338

*bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*<sup>41</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Utang Piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>42</sup> Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih orang lain).<sup>43</sup> Utang piutang adalah, perjanjian dari pihak satu dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjian adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain penerima pinjaman uang.<sup>44</sup>

*Qaradh* menurut bahasa yaitu potongan. Harta yang dibayarkan kepada *mutaqid* (yang diajak akad *qaradh*) dinamakan *qaradh*, oleh sebab itu merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar)<sup>45</sup> *Qaradh* merupakan pinjaman kebijakan tanpa imbalan biasanya untuk barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya)

Objek dari pinjaman *qaradh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika pinjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, h.449

<sup>42</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1136

<sup>43</sup>*Ibid.*, h.760

<sup>44</sup>Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: kencana prenada media group, 2013),

h.9

<sup>45</sup>Rachmad syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandaung: Pustaka Setia, 2001), h. 151

mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.<sup>46</sup>

Menurut Zainuddin Ali *al-qaradh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang membutuhkan dana dan/atau uang. Oleh karena itu, nasabah *al-qaradh* berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman.<sup>47</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian harta orang yang memberi pinjaman tersebut. Ulama secara umum mendefinisikan *qaradh* ialah harta yang dipinjamkan kepada pihak lain, utang tersebut harus dikembalikan dengan nilai yang sama<sup>48</sup>

Menurut istilah *qaradh* dikemukakan para ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *qaradh* ialah mempunyai manfaat secara belaka.
- b. Ibnu Rif'ah, *qaradh* ialah kebolehan mengambil keuntungan suatu barang dengan hallal serta tetap zatnya agar dapat dikembalikan.
- c. Menurut Al-Mawardi, *qaradh* ialah memberikan manfaat-manfaat.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers 2013), h. 46

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: sinar grafika 2016), h.4

<sup>48</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillah* (Bairut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 3786

<sup>49</sup> Shaleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.493



- d. Menurut Syafi'iyah, *qaradh* ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
- e. Menurut Malikiyah, *qaradh* ialah pemilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.
- f. Menurut Hanabilah, *qaradh* ialah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari pinjaman atau yang lainnya.<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami *qaradh* ialah pinjaman uang atau modal yang diberikan kepada pihak lainnya, yang mana pinjaman ini dipergunakan guna usaha atau bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang sama tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *qaradh* tidak berbunga, karena prinsip dalam *qaradh* ialah wujud tolong menolong.<sup>51</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, piutang ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang ialah menerima uang atau barang, dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dengan jumlah yang sama. Selain itu akad utang piutang ialah akad yang bercorak *ta'awun*

---

<sup>50</sup> Hendi suhendi, *Op.Cit.*, h. 91

<sup>51</sup> Imam mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.169

(pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan. Transaksi utang piutang dapat membayar hutangnya atau jika tetap tidak bisa membayar hutangnya maka lebih baik cari cara yang tidak menyulitkan peminjam atau hutang tersebut direlakan untuk tidak dibayarkan oleh peminjam dan disarankan agar mempertimbangkan antara manfaat dan mudharat serta pemberian penangguhan waktu bagi peminjam.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian Utang Piutang

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi-nya, Muhammad SAW yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat, membacanya memiliki ibadah yang diturunkan secara mutawir dan yang ditulis pada *mushaf*, mulai dari pertama surat Al-Fa tihah (1) sampai dengan akhir surat An-Nas (114).<sup>52</sup> Dalam Al-Qur'an ketentuan tentang utang piutang tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman utang piutang dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti dalam surat Al-Qur'an sebagaimana dibawah ini:

#### 1) Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

<sup>52</sup> Rosihon Anwar, *Ulumur Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h.34

*bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*<sup>53</sup>

2) Al-Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”<sup>54</sup>

b. Berdasarkan hadis

Hadis ialah seluruh yang diumumkan langsung dari Nabi SAW baik berupa sabda, perbuatan, *taqrir*, sifa-sifat maupun hal *ihwal*.<sup>55</sup> Hadis adalah sumber kedua setelah Al-Qur’an, didalam hadis juga disebutkan mengenai dasar hukum hutang piutang antara lain:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Artinya: “Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan akan membayarnya maka Allah akan tunaikan untuknya, dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya) maka Allah akan membinasakannya.” (HR Al-Bukhaari no. 2387)<sup>56</sup>

<sup>53</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1971), h. 157

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 60

<sup>55</sup>M. Agus Solahudin Dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.15

<sup>56</sup>Ahmad bin Muhammad, *Al-Shafi’i Al-Qastalani, Irshadu Al-Sari Lisharhi Sahihi Al-Bukhari*, Juz 5, (Beirut: Dar al-kutub al-‘Ilmiyah, 2009), h.379.

Dari hadis di atas mampu dijelaskan bawasannya hutang piutang itu dibenarkan dan disahkan. Allah SWT akan membagikan balasan berlipat-lipat untuk seorang yang ingin memberikan hutang terhadap saudaranya yang menginginkan pertolongannya. Dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolongnya sampai hutang tersebut terbayarkan.

Para ulama' sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ulama' ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 yang menetapkan bahwa:

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 19 *al-Qardh* 3  
Dewan Syariah Nasional MUI
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qaradh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

#### Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

#### Ketiga : Sumber Dana Dana



Al-Qardh dapat bersumber dari:

- b. Bagian modal LKS.
- c. Keuntungan LKS yang disisihkan.
- d. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>57</sup>

Menurut uraian di atas tidak adanya larangan dalam suatu perjanjian utang piutang apabila tidak melanggar hukum dan sesuai aturan beritu pula menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional tidak melarang adanya suatu perjanjian utang piutang, apabila memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan menurut syara' maka praktik utang piutang diperbolehkan.

---

<sup>57</sup> Fatwa Dewan Nasional-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 *Utang Piutang*

### 3. Rukun Dan Syarat Perjanjian Utang Piutang

Rukun ialah unsur yang mengandung bagian tak terpisahkan dari suatu pelaksanaan lembaga yang menetapkan sah atau tidaknya pelaksanaan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang tergantung dalam kebenaran hukum syar'i dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya mengakibatkan hukum pun tidak ada.<sup>58</sup>

#### a. Rukun Utang Piutang

Rukun utang piutang (*qaradh*) menurut Hanafiyah ialah ijab dan kabul.

Sementara menurut Jamhur Ulama *qaradh* ada tiga yaitu:

- 1) *Aqid* yaitu pihak yang berutang piutang, terdapat dari pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*)
- 2) *Ma'qud'alih* yaitu barang yang diutangkan
- 3) *Shigat al-aqd* yaitu ungkapan ijab dan kabul atau surat persetujuan antara kedua belah pihak akan surat terlaksananya suatu transaksi.

#### b. Syarat Utang Piutang

- 1) *Aqid* (dua belah pihak yang berakad)
  - a) Baligh ialah dapat bertindak hukum artinya berakal sehat atau merdeka.
  - b) *Muqaridh* ialah pihak yang memiliki kebebasan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'* artinya harta yang diutang

---

<sup>58</sup> Abdul Aziz Dahlan, *ed ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5 ( Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1510

merupakan milik sendiri. Pendapat ulama *Syafi'ah ahliyah* (kecakapan dan kepantasan) pada akad *qaradh* harus dengan kerelaan bukan dengan paksaan. Menurut Ulama *Hanabillah* untuk pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh mengutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh mengutangkan harta wakaf.

2) *Mauqud'alaih* (objek utang)

- a) Harta ialah harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang diukur dan harta yang dapat dihitung yang diungkapkan adalah *mal misliyat*.
- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta dapat ditukar, ditimbang dan dihitung, atas dasar ini tidak diperbolehkannya mengutangkan manfaat (jasa)
- c) *Al-qubad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima. Karena di dalam akad *qaradh* ada *tabarru'*. Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.
- d) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang mengutangkan (*muqridh*)
- e) Orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harga yang sama. Artinya menjadi tanggung jawab *muqtarid* (orang yang berutang)

- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dipergunakan dalam Islam
  - g) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadar dan sifatnya.
  - h) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
- 3) Ijab dan Kabul (*sighat al-aqd*)

Akad qaradh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal qaradh atau yang sama dengan pengertiannya seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu” demikian pula Kabul sah dengan semua lafal yang menunjukan kerelaan seperti “aku berutang” atau “aku menerima utang”

Akad *qaradh* dimaksud untuk saling tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan semata. Karena didalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak yang member utang atau orang yang mengutangkan. Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran maka hukumnya haram dan termasuk riba.<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas rukun dan syarat harus dipenuhi oleh para pihak yang akan berakad atau melakukan suatu perjanjian utang piutang. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak

---

<sup>59</sup>Rozalinda, *Op.Cit.*, h.232

terpenuhi maka suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat mengikat suatu perjanjian.

#### 4. Etika Dalam Perjanjian Utang Piutang

Disamping adanya syarat dan rukun utang piutang juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah utang piutang, yaitu:

- a. Utang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi hutang
  - 1) Orang yang menghutangkan wajib member tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
  - 2) Pihak pemberi utang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dihutangkan.
  - 3) Tidak diperbolehkan menagih sebelum jatuh tempo pembayaran yang sudah ditentukan bersama.
  - 4) Sepatutnya menagih dengan sikap yang lemah lembut dan penuh rasa maaf.
  - 5) Memeberikan penundaan waktu tempo pembayaran terhadap pihak yang sedang dalam masa sulit untuk melunasi utangnya setelah jatuh tempo.<sup>60</sup>
- c. Etika bagi orang yang berhutang

---

<sup>60</sup>Abdul Madjid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung:1986), h.1



- 1) Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang padahal ia mampu maka ia tergolong orang yang zalim. Artinya diwajibkan kepada orang yang berutang untuk sesegera mungkin melunasi utangnya takala ia telah mampu melunasinya.
- 2) Dengan kata lain bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan utang kepada si penghutang. Oleh sebab itu Pemberi utang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang (*muqtaris*) dalam bentuk apapun.
- 3) Berutang untuk bersenang-senang, berutang dengan niat meminta karena jika minta tidak diberi, maka digunakan istilah utang agar mampu memberi dan berutang dengan niat akan melunasi. Yang artinya berutang harus dengan niat baik, dalam arti berutang tidak untuk tujuan buruk.
- 4) Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah utang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan. Sebab jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang yang berutang memberitahu

kepada orang yang memberi utang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan.<sup>61</sup>

Uraian di atas menjelaskan apabila seseorang yang berutang ataupun yang memberikan utang itu memiliki etika dalam perjanjian utang piutang yang mana harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dan tidak melanggar aturan menurut syara'. Oleh sebab itu setiap perjanjian itu terdapat etika dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak dan hal tersebut harus ditaati sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

## 5. Manfaat Perjanjian Utang Piutang

Hukum bagi orang yang berutang adalah boleh (*mubah*), dengan demikian hukum utang piutang bagi orang yang memberi utang adalah sunnah bahkan wajib (terhadap orang yang sangat membutuhkan) dan bagi orang yang berutang hukumnya adalah boleh (*mubah*) bahkan haram (apa bila dipergunakan untuk maksiat).

Manfaat orang melakukan perjanjian utang piutang terutama bagi yang meminjamkan dapat pertolongan dari Allah SWT bawasannya seorang muslim yang mempiutangi seorang muslim dua kali seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali.

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, h.75

## 6. Berakhirnya perjanjian utang piutang

Pengembalian *qaradh* hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad *qaradh* itu berlangsung. Tetapi apabila *muqridh* meminta pengembalian *qaradh* di tempat yang ia hendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan *muqtaridh*. Akad utang piutang (*qaradh*) berakhir apabila objek *qaradh* ada pada *muqtaridh* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqridh* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian.

Pelaksanaan utang piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang bertransaksi karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtaridh* (orang yang meminjam) meninggal dunia maka *qaradh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Maka ahli warisnya berkewajiban melunasi utang tersebut. Tetapi *qaradh* dianggap lunas atau berakhir apabila *muqridh* (pemberi pinjaman) menghapus utang tersebut dan menganggapnya lunas.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian di atas utang piutang berakhir apabila bila pihak peminjam utang telah membayar utangnya dengan jumlah yang sama, maka perikatan utang piutang telah berakhir pada saat pelunasan utang. Dan berakhirnya utang piutang apabila syarat dan ketantuan telah disepakati dan dilaksanakan bersama.

---

<sup>62</sup>Rozalinda, *Op.Cit.*, h.235

## C. Jaminan Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian jaminan dalam hukum Islam

Jaminan atau barang jaminan menurut Islam disebut dengan *ar-rahn*. Secara etimologi kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Dalam hukum Islam *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. Definisi *ar-rahn* secara syara' adalah menjaminkan utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap hutang.

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan oleh ulama fiqh, menurut ulama Malikiyah mendefinisikan *ar-rahn* yaitu "*harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat*" yang artinya barang yang dijadikan jaminan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara actual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, maka yang diserahkan adalah surat jaminannya atau sertifikatnya.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* "*dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya*" yang artinya barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanyalah bersifat harta yang bersifat materi, tidak termasuk

manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu termasuk dalam pengertian harta. *Ar-rah*n di tangan pemberi utang hanya berfungsi sebagai jaminan utang oleh orang yang berutang.<sup>63</sup>

Dapat dijelaskan jaminan adalah sesuatu yang di berikan pihak peminjam utang guna jaminan utang dan di terima oleh pihak pemberi utang. Jaminan tersebut berfungsi hanya sebagai jaminan utang dan tidak dapat diperjual belikan barang yang dijaminakan. Pemberi jaminan tidak mendapatkan uang atas barang yang dijaminakan melainkan hanya mendapat kepercayaan oleh pihak pemberi utang.

## 2. Dasar Hukum Ar-rah

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rah*n dibolehkan dalam Islam berdasarkan surah Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ...

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Al-Baqarah 2 : 283)<sup>64</sup>

Menurut pengertian ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa para ulama sepakat menyatakan bahwa *ar-rah*n boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung

<sup>63</sup> Nasrun Haroen , *Op.Cit.*, h.251



dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pihak pemberi utang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi utang secara langsung, maka paling tidak semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam atas al-marhun (menjadi jaminan utang). Misalnya apabila barang jaminan itu berbentuk tanah, maka yang dikuasai adalah surat atau sertifikat.

### 3. Rukun dan Syarat jaminan

#### a. Rukun jaminan

- 1) *Ar-rahin* (orang yang menyerahkan jaminan) dan *al-murtahin* (orang yang menerima barang jaminan)
- 2) *Al-mahrin* (barang jaminan)
- 3) *Al-mahrin bih* (utang)
- 4) *Shigat*

#### b. Syarat jaminan

- 1) *Ar-rahin* dan *murtahin* keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum.
- 2) *Marhum bih* (utang) disyaratkan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang dan utang itu dapat dilunasi dengan barang jaminan, serta utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat maupun kadarnya.

#### 4. Jaminan dalam perjanjian utang piutang

Jaminan dalam bermasyarakat biasanya itu adalah wujud sosial yang mana jaminan sosial merupakan salah satu nilai instrumental yang sangat penting dalam sistem hukum ekonomi Islam. Karena itu, melaksanakan jaminan sosial, manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, menjadikan harta mereka bersih dan berkembang, menghilangkan sifat tamak serta mementingkan diri sendiri.<sup>65</sup>

Jaminan utang atau disebut dengan *Ar-Rahn* yang artinya menahan hak milik yang dapat dijadikan pelunasan utang. Artinya menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

Dalam *mausu'ah al-muamalat al-maliyah* dijelaskan *ar-rahn* adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang yang dapat dijaikan pembayar utang sesuai dengan nilainya jika pihak yang meminjam tidak dapat melunasi pinjamannya.<sup>66</sup>

Menurut ahli fiqh syarat jaminan utang pitang, adalah:

- a. Jaminan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.

---

<sup>65</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 6

<sup>66</sup>Rozalinda, *Op.Cit.* h.252

- b. Jaminan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam. Sehubungan dengan itu misalkan *khamar* (minuman keras), karena tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka barang yang demikian itu tidak boleh dijadikan jaminan utang.
- c. Jaminan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- d. Jaminan tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruh)
- e. Jaminan harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>67</sup>

Istilah antara kreditur dan debitur yang mengadakan perjanjian pinjam meminjam biasanya terdiri:

- a. Perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok
- b. Perjanjian (*assesoir*) dengan perjanjian pemberian jaminan utang yang berbentuk Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan.

Pada hakikatnya yang dijaminakan dari suatu perjanjian utang piutang adalah tanah dan bangunannya bukan sertifiktnya biasanya SHM melalui suatu Lembaga Penjaminan yang dikenal dengan Hak Tanggungan karena

---

<sup>67</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbangkan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* ( Jakarta: Kencana 2014), h. 369

setelah sertifikat Hak Tanggungan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.<sup>68</sup>

Hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur sering kali disertai jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa benda dan dapat pula berupa uang. Apabila ada benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya dalam hal debitur tidak membayar atau wanprestasi.

Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu benda bergerak, hak atas benda jaminan disebut gadai. Selain gadai masih ada lagi hak jaminan yang mirip dengan gadai yaitu retensi dan jika benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, hak atas benda jaminan itu disebut hak tanggungan.<sup>69</sup>

Barang yang dapat dijaminkan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjual-belikan, karena tidak ada harganya atau haram untuk diperjual-belikan. Hal tersebut tergolong barang yang tidak dapat dijaminkan, sebab tujuan utama disyariatkan jaminan tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjual belikan.

---

<sup>68</sup>Bakir Ihsan "Perjanjian Pinjam Meminjam, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol 17, No.2, (November 2017) h. 50

<sup>69</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Cintra Aditya Bakti 2014), h. 171

## 5. Memanfaatkan Barang Jaminan Menurut Islam

Hakikat akad *ar-rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilaksanakan tanpa adanya imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh karena itu *murtahin* tidak menerima suatu tambahan apapun dari *rahin*.

Begitu juga dengan barang jaminana, tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima jaminan. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Akad *ar-rahn* dimaksud sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan darinya.<sup>70</sup>

Pada dasarnya barang jaminan, biaya pemeliharaan dan manfaatnya adalah milik orang yang menjaminankan (*ar-rahin*). *Murtahin* tidak boleh mengambil manfaat barang jaminan tersebut kecuali bila barang tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya. *Murtahin* boleh menggunakan dan mengambil air susu hewan apabila ia memberikan nafkah (memelihara hewan tersebut). Pemanfaatan *marhun* sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memeratikan keadilan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

---

<sup>70</sup> Rozalinda, *Op.Cit.*,h.257

لَرَّهْنٌ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنٌ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ  
مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya : “Barang gadaian berupa hewan tunggangan boleh ditunggangi sesuai nafkah yang diberikan. Susu yang diperas dari barang jaminan berupa hewan susuan boleh diminum sesuai nafkah yang diberikan. Namun, orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan” (HR. Bukhari no. 2512).

Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang jaminan. Sebab sebelum dan setelah dijaminakan, barang jaminan adalah milik orang yang berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang sepenuhnya. Adapun pemberi utang hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang.

Dengan demikian, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang jaminan, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. “Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba” dengan demikian hukum asal jaminan yang menganut kaidah sama dengan utang piutang.



## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah berdirinya Desa Talang Jawa**

Pekon Talang Jawa merupakan pekon berada di Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus. Pekon Talang Jawa awalnya bernama Pedukuhan Talang Jawa, yang bergabung dengan Pekon Gunung Megang dimana pada tahun 2006 berdasarkan hasil musyawarah dan kemufakatan seluruh elemen masyarakat yang ada di pekon Gunung Megang dan pedukuhan Talang Jawa, maka pada tahun 2007 pedukuhan Talang Jawa dimekarkan menjadi Pekon Talang Jawa

Batasan pekon:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan pekon Datarajan kecamatan Ulu Belu
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Gunung Megang
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Talang Beringin
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan pekon Air Bakoman kecamatan Air Bakoman

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Pekon adalah ketersediaan RPJM Pekon dan RK Pekon. Karena kedua Dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan

jangka pendek Pekon. Maka kualitas RPJMPekon dan RKPekon menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas Dokumen maupun kesesuaian dengan Perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Pekon (PKP) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon.

Nama-nama kepala pekon talang jawa yang pernah atau sedang menjabat yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Nama-nama kepala pekon talang jawa yang pernah atau sedang menjabat**

1.	2007-2008	DARMAWAN	Pj.KAKON
2.	2008-2014	HATAMSAH	KAKON
3.	2014-2015	MAHIDIN.SE,MM.	Pj.KAKON
4.	2015-2021	MUHAIDI	KAKON

## **2. Letak geografis Desa Talang Jawa**

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Pekon, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan. Penyusun RKP Pekon di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Pekon Talang Jawa

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah

Dusun yang telah dilakukan pada:

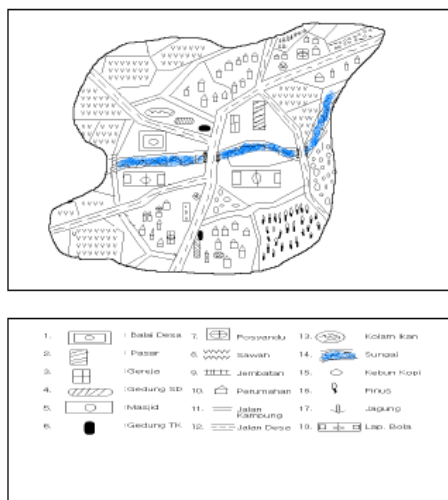
**Tabel 1.2 forum musyawarah dusun**

No.	Dusun	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1.	I	14 Desember 2016	Rumah Kepala Suku
2.	II	16 Desember 2016	Rumah Kepala Suku
3.	III	18 Desember 2016	Rumah Kepala Suku

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, kemudian dituangkan dalam format berikut ini:

**Tabel 1.3 sketsa desa dan daftar masalah dari potret desa**

**a. POTRET/SKETSA DESA**



**b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA**

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam/lahan tambak - Aliran/irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

**Tabel 1.4 kalender musim dan daftar masalah dari kalender musim****a. GAMBAR KALENDER MUSIM**

MASALAH KEHATAN KEMAU	PANCARABA			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	MRT	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	***	*	-	-	-	-	-
Kewalahan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Banjir	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panas	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanah Dvt.	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	*	-

**b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM**

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tani - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare.	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

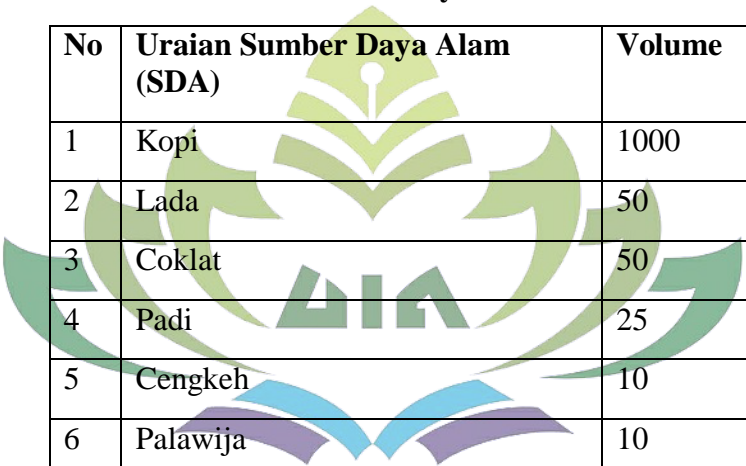
**a. Kondisi Umum Pekon****1) Geografis****a) Letak dan Luas**

Wilayah Pekon Talang Jawa merupakan salah satu dari 21 Pekon di Wilayah Kecamatan Pulaupanggung, yang terletak Kecamatan Pulaupanggung, Pekon Talang Jawa mempunyai luas wilayah seluas 2.300 Hektar.

b) Iklim

Iklim Pekon Talang Jawa, sebagaimana Pekon-pekon lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus.

**Tabel 1.5 Daftar Sumber Daya Alam**



No	Uraian Sumber Daya Alam (SDA)	Volume	Satuan
1	Kopi	1000	Ha
2	Lada	50	Ha
3	Coklat	50	Ha
4	Padi	25	Ha
5	Cengkeh	10	Ha
6	Palawija	10	Ha
7	Lahan Tidur	25	Ha

### 3. Keadaan Demografis Desa Talang Jawa

#### a. Jumlah Penduduk

Pekon Talang Jawa mempunyai jumlah penduduk 1.400 Jiwa, yang tersebar dalam 3 wilayah Kesukuan dengan perincian tabel berikut:

**Tabel 1.6 Daftar Sumber Daya Manusia**

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Volume	Satuan
1	Petani/Pekebun	150	Orang
2	Tukang	25	Orang
3	PNS	5	Orang
4	Buruh	25	Orang
5	Wiraswasta/Pedagang	15	Orang
6	Peternak	25	Orang

**b. Kebudayaan**

Potensi kekayaan Sosial Budaya di Pekon Talang Jawa sangat beragam, selengkapnya sebagai berikut:

**Table 1.7 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya**

NO	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1	Kelompok Rabanahan Anak-anak TPA Pekon Talang Jawa	4	24
2	Kelompok Rabana Ibu-Ibu Pengajian Pekon Talang Jawa	4	40
3	Kelompok Rabana RISMA Pekon Talang Jawa	3	60
4	Kelompok Marhabah Talang Jawa	3	40
5	Kelompok Rabana Bapak-bapak Talang Jawa	2	50
6	Kelompok Seni Budaya Semende (kuntau)	2	130



## **B. Pelaksanaan Perubahan Akad Utang Piutang Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung**

Untuk mengetahui pelaksanaan perubahan akad utang piutang wawancara dilakukan kepada para pihak yang berakad yaitu pihak yang berutang dan pihak yang memberikan utang. Menurut penelitian sistem perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus adalah sistem yang mana jarang dilakukan masyarakat pada umumnya. Sebab pelaksanaan akad utang pada awalnya tidak ada jaminan sehingga timbulnya jaminan pada waktu jatuh tempo.

Menurut Bahendi selaku pemberi utang menerangkan bahwa pelaksanaan praktik utang piutang adalah wujud tolong menolong sesama manusia, dimana seorang yang meminjam uang dengan berbagai alasan-alasan tertentu untuk kebutuhannya kepada salah satu pemberi utang, dan praktik tersebut tidak diberi jaminan melainkan hanya sebatas perjanjian hitam diatas putih.

Pelaksanaan perubahan akad tersebut terjadi saat jatuh tempo atau yang sering disebut dengan waktu pembayaran utang, yang mana perubahan tersebut di ubah oleh pihak peminjam utang bukan pemberi hutang. Perubahan akad yang yang dimaksud adalah adanya jaminan yang sebelumnya tidak ada.

Hal ini terjadi akibat pihak peminjam utang belum bisa membayar pada waktu yang telah disepakati bersama, maka dengan rendah hati pihak peminjam utang merasa tidak sungkan sebab uang yang telah dipinjam belum dibayar maka ia mengjaminkan kebun miliknya kepada pihak pemberi hutang dengan tujuan

sebagai pelunasan utang. Dan kebun yang dijaminkan dapat dimanfaatkan atas dasar persetujuan pihak peminjam utang.<sup>71</sup>

Hasil wawancara dengan Hatamzah sebagai pemberi utang memaparkan bahwa pelaksanaan perubahan akad utang piutang terjadi pada saat jatuh tempo, yang mana pihak peminjam utang belum bisa membayar utang maka ia merubah akad tersebut menjadi jaminan pelunasan utang.

Dengan adanya jaminan tersebut utang sebelumnya tidak berkurang sama sekali, dan pihak peminjam utang dapat mengambil kebun tersebut apabila ia sudah bisa membayar. Praktik ini tidak ada unsur keterpaksaan melainkan pihak peminjam yang menginginkan hal tersebut terjadi, sebab pihak peminjam utang merasa sungkan akibat utang yang dipinjam belum bisa dibayar pada saat waktu yang telah disepakati bersama.<sup>72</sup>

Satimin selaku peminjam utang menjelaskan bahwa di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kecamatan Tanggamus praktik-praktik yang terjadi mengenai utang piutang itu adalah wujud tolong menolong. Utang piutang dilakukan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dana secara mendesak demi terpenuhinya kebutuhan yang dibutuhkan. Praktik di Desa ini tidak ada jaminan apabila ingin berhutang cukup dengan perjanjian tertulis dan ada saksi itu sudah cukup, tidak seperti di Bank harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus

---

<sup>71</sup> Wawancara, Bahendi, 15 april 2019

<sup>72</sup> Wawancara, Hatamzah,. 15 april 2019

menyertakan jaminan. Namun hal bisa terpenuhi apabila harus dengan kesepakatan bersama bukan adanya unsur keterpaksaan.

Sistem perubahan akad yang terjadi di Desa ini adalah berubahnya akad utang akibat adanya jaminan pada saat jatuh tempo dan utang belum bisa dilunasi. Karena merasa tidak enak dengan pemberi utang maka kebun yang dimiliki harus dijadikan jaminan sebagai pelunasan utang, barang yang dijaminakan dapat dimanfaatkan dan diperbolehkan oleh pihak peminjam utang.<sup>73</sup>

Menurut Suwardi selaku peminjam utang memaparkan bahwa transaksi utang piutang adalah hal yang sering terjadi diamanapun berada, namun yang membuat praktik utang piutang di Desa tersebut berbeda dengan praktik pada umumnya yang mana tidak adanya jaminan dan dapat berubah akad. Perubahan akad itu terjadi pada saat pihak peminjam utang belum bisa membayar utang pada waktu yang telah disepakati maka ia menjaminkan kebun guna pelunasan utang.

Apabila peminjam ingin berutang biasanya disertakan jaminan saat awal transaksi, namun jaminan yang terjadi di Desa tersebut dilaksanakan pada saat waktu jatuh tempo akibat belum bisa melunasi utang. Barang yang dijaminakan dapat dimanfaatkan dan hasilnya dapat diperoleh oleh pemberi utang. Oleh sebab itu berbeda praktik di Desa ini sangat kental dengan sikap tolong menolong. Sebab mayoritas masyarakatnya petani, yang mana penghasilan tidak seberapa dan masih merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka praktik utang

---

<sup>73</sup> wawancara, Satimin., 18 april 2019

piutang sangat membantu masyarakat setempat untuk saling tolong menolong sesama.<sup>74</sup>

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Akad Utang Piutang Pada Masyarakat Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung**

Data penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara yang merupakan data penunjang dalam penelitian ini. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memilih informasi langsung dari pihak-pihak yang berakad yaitu pemberi utang dan peminjam utang.

Kecilnya pendapatan para petani di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung mengakibatkan transaksi utang piutang bukan hal asing lagi melainkan suatu kebiasaan sikap saling tolong menolong, namun tidak jarang akad tersebut berujung pada perubahan akad. Perubahan yang dilakukan oleh peminjam utang tidak adanya unsur keterpaksaan melainkan atas jaminan pelunasan utang.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan akad terjadi akibat terlambatnya membayar utang yang telah dipinjam oleh peminjam utang dalam waktu yang telah ditentukan bersama. Faktor tersebut dilaksanakan atas dasar permintaan pihak peminjam utang itu sendiri, bawasannya akad utang piutang terdapat jaminan pada saat jatuh tempo atas dasar jaminan pelunasan utang.

Satimin sebagai peminjam utang mengatakan bahwa utang piutang di Desa tersebut adalah sikap saling tolong menolong, sebab mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani dan pendapatannya naik turun setiap tahun serta

---

<sup>74</sup> Wawancara, Suwardi ., 18 april 2019

penghasilan petani tidak dapat ditentukan. Transaksi utang piutang dilakukan atas kesepakatan bersama dan diberi waktu tempo selama setahun tanpa adanya jaminan yang diberikan. Pada jatuh tempo utang belum bisa di bayar maka diberi keringanan agar diberi waktu untuk pelunasan, namun waktu yang diberikan tidak cukup untuk melunasi utang tersebut, maka pihak yang berutang menjaminkan kebun miliknya atas dasar pelunasan utang. Kebun kopi yang di jaminakan dapat dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang.<sup>75</sup>

Sementara itu berdasarkan pernyataan Bahendi sebagai pemberi utang mengatakan Transaksi utang piutang di Desa tersebut sudah bukan hal biasa, sudah sepantasnya saling tolong menolong. Namun tidak semua praktik berubah akad seperti yang dilakukan beberapa masyarakat yang belum bisa membayar pada jatuh tempo. Perubahan akad dilakukan atas dasar permintaan peminjam utang, praktik yang terjadi adalah pada saat perjanjian utang piutang tidak diberikan jaminan, namun pada waktu pembayaran utang belum bisa membayar maka pihak pemberi utang menjaminkan kebun miliknya guna pelunasan utang.<sup>76</sup>

Praktik perubahan akad pada dasarnya tidak seperti praktik pada umumnya, sebab dalam akad tersebut tidak terdapat kecacatan atau kurangnya rukun dan syarat dalam suatu perjanjian melainkan akibat suatu alasan pada salah satu pihak yang berakad. Alasan yang terjadi yaitu akibat pihak yang berutang

---

<sup>75</sup> Satimin, *Op.Cit.*, wawancara

<sup>76</sup> Bahendi, *Op.Cit.*, wawancara

belum bisa membayar utang pada waktu yang telah disepakati bersama dan ia menjaminkan kebun miliknya sebagai pelunasan utang.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penelitian dapat dilihat faktor penyebab terjadinya perubahan akad utang piutang akibat pada saat perjanjian utang piutang tidak diberikan jaminan agar suatu saat tidak dapat melunasi pada waktu yang telah ditentukan atau kemungkinan terjadi pihak peminjam utang dapat kabur atau menghilang dari kewajiban pelunasan. Oleh sebab itu perubahan akad terjadi akibat pada saat jatuh tempo pembayaran pihak peminjam utang belum bisa membayar utang sehingga menjaminkan kebun miliknya guna pelunasan utang.

Dalam praktik perubahan tersebut barang yang dijaminkan adalah kebun kopi milik peminjam utang, dan kebun yang dijadikan sebagai jaminan tersebut dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang yang diperbolehkan oleh pihak peminjam utang.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Perubahan Akad Utang Piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus**

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang di perjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain senerima pinjaman uang. Dalam suatu transaksi perjanjian utang piutang selalu melibatkan dua pihak atau lebih yaitu pihak pemberi utang dan pihak peminjam utang serta ada saksi yang melibatkan suatu perjanjian utang piutang, hal ini disebabkan takut terjadinya ketidakadilan dalam berakad. Sebelum transaksi terjadi kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai banyak uang yang dipinjam dan waktu tempo pengembalian utang serta syarat-syarat lainnya. Termasuk penelitian pembahasan ini didalamnya mengenai perubahan akad utang piutang yang digunakan oleh salah satu pihak yang berakad.

Konsep perubahan akad utang piutang yang di teliti dalam pembahasan ini diantaranya menyangkut keterlambatan pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Yang mana hal tersebut terjadi akibat minimnya pendapatan seorang yang berutang mengakibatkan akad tersebut diubah atas dasar sebagai jaminan pelunasan utang.

Praktik utang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung yaitu seorang peminjam utang berhutang sebesar Rp.10.000.000 kepada pemberi utang. Berhutang dilakukan dengan berbagai alasan salah satunya akibat keadaan ekonomi yang memaksa, maka dengan berhutanglah perekonomian dapat dibantu meski harus dibayar pada waktu yang telah di tentukan dan disepakati bersama.

Praktik utang piutang ini dilakukan dalam waktu tempo satu tahun yang disepakati bersama. Ketentuan ini tidak terdapat paksaan ataupun keterpaksaan melainkan kerelaan para pihak atas transaksi tersebut. Dan praktik yang dilakukan melakukan perjanjian lisan dan tertulis, guna menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam berakad.

Di Desa Talang Jawa ini waktu tempo satu tahun itu sama dengan waktu musiman, yang artinya waktu pembayaran utang dibayar saat musim atau saat panen. Sebab mayoritas masyarakat di Desa setempat adalah petani kopi, dan waktu pembayaran pun saat panen di tahun selanjutnya setelah transaksi utang piutang berlangsung.

Maksud dari musiman dalam hal tersebut adalah suatu perjanjian yang dilakukan pada waktu belum panen, dan waktu pembayaran tersebut dilakukan saat musim tahun yang akan datang. Menurut kurun waktu satu tahun itu adalah 12 bulan, yang mana pada praktik ini satu tahun itu tidak mencapai 12 bulan, melainkan sesuai waktu kebun-kebun yang dimiliki itu berbuah, seperti kopi dan

saat panen tersebut maka hasilnya dapat dijual dan bisa membayar utang yang telah di pinjam.

Pada saat waktu jatuh tempo atau musim tahunan telah tiba maka pihak peminjam utang harus membayar utang yang ia pinjam namun pihak peminjam belum bisa membayar utang yang ia pinjam. Hal tersebut terjadi akibat hasil panen dari kebun yang didapatkan tidak mencukupi untuk membayar utang yang dipinjam. Akibat utang yang belum bisa dibayar pihak peminjam utang menjaminkan kebun miliknya sebagai pelunasan utang. Jaminan yang dilakukan oleh pihak pemberi utang adalah dilakukan bukan atas dasar permintaan pemberi utang, melainkan kemauan sendiri. Dan jaminan yang dilakukan guna untuk pelunasan utang.

Praktik jaminan yang dilakukan di Desa setempat adalah praktik yang memang tidak asing lagi, melainkan hal yang sudah biasa terjadi. Namun atas dasar tersebut itu adalah sebagai jaminan pelunasan utang yang mana pihak peminjam utang belum bisa membayar utang pada waktu yang telah disepakati. Barang yang dijaminakan adalah kebun kopi dan dapat dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang, hal tersebut diperbolehkan oleh pihak peminjam utang.

Di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung perubahan akad tidak dapat dipahami secara teori, karena mayoritas masyarakat setempat hanya petani dan minimnya pengetahuan mengenai praktik perubahan tersebut. Masyarakat di

Desa tersebut hanya mewujudkan sikap tolong menolong pada sesama makhluk terutama sesama muslim atas dasar ridha Allah SWT.

Manfaat yang diperoleh oleh peminjam utang adalah mempermudah mendapatkan dana pada waktu yang sangat di butuhkan atau mendesak dan dipergunakan semestinya akad dilakukan. Serta manfaat yang diperoleh oleh pemberi utang mendapatkan ridha dari Allah SWT atas dasar tolong menolong sesama manusia serta kebaikan lainnya. Namun pemberi utang mendapatkan manfaat setelah menerima barang jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam utang guna pelunasan utang dan diperbolehkan tidak ada unsur keterpaksaan.

Kemudian praktik di desa talang jawa terjadinya perubahan akad utang piutang menurut penelitian yang dibahas, hal tersebut terjadi akibat waktu jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak namun pihak peminjam utang belum bisa membayar utangnya dan ia langsung menjaminkan kebun miliknya kepada pemberi utang. Mengenai tujuan peminjam utang menjaminkan kebun kepada pemberi utang atas dasar pelunasan utang yang mana pada waktu tempo belum bisa membayar meski telah diberi waktu tambahan untuk pembayaran. Oleh sebab itu praktik yang dilakukan di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung tidak seperti praktik pada umumnya yang jaminan terdapat di awal akad, namun pelaksanaannya jaminan muncul pada saat belum bisa membayar utang dipinjam. Dan barang jaminan dapat dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang sebab telah diperbolehkan oleh pihak peminjam utang.

## B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang Piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong. Salah satu bentuk dari tolong menolong antar sesama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara bermuamalah. Bermuamalah yang diterapkan di kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum *syara'* sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan dari asas bermuamalah. Seperti kaidah fiqh muamalah yaitu sebagai berikut:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Maksud dari kaidah ini adalah selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimana mementingkan kepentingan sepihak saja, maka muamalah itu diboleh (*mubah*). Berkaitan dengan *muamalah* pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang ingin melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Agama. Dalam setiap *muamalah* dan transaksi, pada dasarnya boleh. Seperti jual beli sewa menyewa, gadai, kerja sama dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung adalah praktik perubahan transaksi utang piutang sebagai jaminan pelunasan utang yang belum bisa dibayar pada saat jatuh tempo atas dasar kesepakatan bersama. Pada awalnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dengan suatu akad diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan guna tercapainya suatu akad sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan semua pihak.

Perubahan dalam pelaksanaan akad lahir atas dasar persetujuan. Para pihak membuat persetujuan dengan jalan menghapuskan perjanjian lama, dan pada saat yang bersamaan dengan penghapusan tersebut, perjanjian diganti dengan perjanjian baru, dengan hakikat perjanjian baru serupa dengan perjanjian terdahulu.

Perubahan dalam pelaksanaan akad dapat terjadi karena beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Akad dalam perjanjian tersebut telah rusak sehingga harus diperbarui dengan akad lain.
2. Adanya *khiyar*.
3. Adanya pembatalan akad secara sepihak.
4. Pihak yang melakukan akad tidak dapat melaksanakan akad pada waktu yang disepakati.



Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. akad merupakan keterkaitan atau pertemuan Ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama, akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terikat satu sama lain karena akad adalah keterikatan kehendak kedua belak pihak yang tercermin dalam Ijab dan Kabul.

Rukun akad yang terjadi dalam pelaksanaan praktik ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Ijab dan Kabul

Dalam praktik ini, ijab kabulnya dilakukan secara tertulis yang mana terdapat nama para pihak serta ada saksi yang menyaksikan guna terhindarnya dari kesalahan-kesalahan dalam berakad. Dan perjanjian yang terdapat tanda-tangan para pihak serta diberi materai sebesar Rp.6000. dan pelaksanaan ijab dan kabul dilakukan atas dasar masing-masing menyetujui suatu transaksi yang dilakukan.

#### 2. *Aqid* (orang yang berutang piutang)

Perubahan akad ini satu pihak sebagai peminjam utang, dan pihak lain sebagai pemberi utang. Sebagai peminjam utang adalah sebagai seorang yang membutuhkan dana dalam keadaan mendesak dan sangat butuh bantuan, dan pihak peminjam utang harus mampu mengembalikan uang yang dipinjam sesuai apa yang telah disepakati bersama.

Sedangkan sebagai pemberi utang adalah sebagai seorang yang mampu meminjamkan sedikit hartanya guna membantu sesama manusia dalam hal tolong menolong, dan pihak pemberi utang dilarang keras menurut hukum apabila memanfaatkan orang yang berutang atas dasar meminta lebih uang yang dipinjamkan hal ini disebut dengan riba dan haram hukumnya menurut Islam, dan dilarang memaksa serata mengancam pihak pemberi utang atas dasar penagihan utang yang belum waktu pembayara.

Pihak yang melakukan perubahan akad utang piutang adalah pihak peminjam utang, hal ini dilakukan sebagai jaminan pelunasan utang yang mana pihak peminjam utang belum bisa membayar utang pada saat waktu yang telah ditentukan. Praktik yang dilakukan bukan suatu keterpaksaan atau dipaksa melainkan keridhan dan atas kesepakatan bersama.

### 3. *Ma'qud alayh* (objek akad)

Objek yang dilakukan utang piutang ialah suatu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang. Disamping adanya ijab dan kabul serta para pihak yang melaksanakan utang piutang tersebut, pinjaman utang piutang dianggap terjadi jika terdapat objek yang menjadi tujuan dalam utang piutang.

Menurut penelitian praktik perubahan akad di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung dapat terjadi akibat pihak yang melaksanakan akad pada waktu yang telah disepakatai, yang artinya kesepakatan diberikan waktu tempo selama satu tahun pada waktu yang telah ditentukan perjanjian pembayaran utang belum bisa dibayar, oleh karena itu praktik akad yang

dilakukan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama. Kemudian praktik ini dapat terjadi perubahan akad yang pada saat perjanjian utang piutang tidak terdapat jaminan dan pada waktu jatuh tempo terdapat jaminan guna pelunasan utang.

Keridhaan dalam praktik ini artinya adalah para pihak yang berakad itu melakukan suatu perubahan atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Tidak adanya paksaan ataupun dipaksa. Menurut Islam setiap ada transaksi akibat adanya paksaan dari salah satu pihak maka akad tersebut tidak dapat dilanjutkan. Namun berbeda dengan praktik yang dilaksanakan di Desa tersebut yaitu yang mana praktik perubahan akad yang dilakukan atas kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian di atas praktik perubahan akad yang dilakukan oleh pihak yang berutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Pangung Kecamatan Tanggamus sudah sesuai dengan hukum Islam, meski landasan hukum secara khusus mengenai perubahan akad belum dijelaskan secara spesifik akan tetapi perubahan tersebut dapat dijelaskan menurut kaidah fiqh.

Menurut kaidah fiqh yang berbunyi “*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*” atas dasar tersebut diperbolehkan suatu transaksi dengan alasan kedua belah pihak sama-sama menyetujui suatu perjanjian yang dilakukan, dan tidak ada keterpaksaan atau dipaksa oleh salah satu pihak. Hukum Islam mengenai hal *muamalah* harus didasari atas dasar suka sama suka

dan saling merelakan, dengan adanya dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan maka sah melakukan transaksi asal tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Namun pelaksanaan yang terjadi pada praktik perubahan akad utang piutang adalah pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak pemberi utang. Sudah dijelaskan bahwa jaminan atas dasar pelunasan utang diperbolehkan oleh pihak peminjam utang, namun menurut hukum Islam pengambilan manfaat tersebut haram hukumnya karena praktik ini sama dengan riba.

Pihak peminjam utang tidak merasa terpaksa atau dipaksa saat menjaminkan kebun miliknya akan tetapi menurut Islam pihak peminjam utang merasa terdzalimi. Karena penghasilan peminjam utang dari kebun tersebut dan pihak pemberi utang mendapatkan dua keuntungan sekaligus dari pembayaran utang dan pemanfaatan barang yang dijaminkan sebagai pelunasan utang. Praktik tersebut bertentangan menurut hukum Islam sebab memanfaatkan barang jaminan dilarang dan riba hukumnya, riba digambarkan sebagai perbuatan yang batil dan merupakan perbuatan dzalim terhadap orang lain. Allah juga menyebutkan balasan atau hukuman terhadap orang yahudi yang melakukan riba sebagai isyarat bahwa riba juga diharamkan pada umat muslim. Sebagai mana dijelaskan pada surah Al-Qur'an sebagai berikut:

فَيُظْلَمُ مَنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا  
 ١٦٠ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ  
 مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١

Artinya : “Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (Q.S An-nisa’ 160-161)

Menurut ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa pengambilan manfaat barang jaminan itu haram hukumnya dan dilarang untuk mempraktikannya, mesti telah diperbolehkan oleh pihak peminjam utang. Pengambilan manfaat mengakibatkan kedzaliman terhadap peminjam utang dan disebut dengan riba. Oleh sebab itu praktik perubahan akad utang piutang atas dasar pengambilan manfaat barang jaminan yang terjadi di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus haram hukumnya dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan praktik tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus , maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupatenn Tangamus terjadi akibat pada waktu jatuh tempo tidak bisa membayar utang yang dipinjam, dan perubahan yang terjadi adalah pada saat perjanjian utang piutang tidak terdapat jaminan dan waktu jatuh tempo terdapat jaminan. Pihak peminjam utang menjaminkan kebun dan manfaatnya kepada pemberi utang atas dasar pelunasan utang.
2. Tinjauan hukum Islam tentang perubahan akad utang piutang di Desa Talang Jawa Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus tidak sesuai dengan hukum Islam disebabkan pihak pemberi utang mengambil manfaat dari barang jaminan. Pengambilan manfaat tersebut haram hukumnya dan dinamakan riba. Karena pihak piminjam utang terdzalimi atas perbuatan pemberi utang. Namun terkecuali apabila pihak pemberi utang mengambil manfaat hanya sebatas untuk biaya perawatan kebun itu masih diperbolehkan. Tidak dalam praktik ini pihak pemberi utang mendapatkan dua keuntungan sekaligus yaitu mendapatkan pelunasan utang dan manfaat barang jaminan, dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

## 2. SA RAN

Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang melakukan transaksi utang piutang, lambat laun harus dikurangi praktik ini. Meski praktik utang piutang diperbolehkan tetapi bukan suatu hal yang wajib dilakukan dengan kebiasaan. Sebab apabila kita terbiasa dengan berhutang kepada seseorang hanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari itu akan menyebabkan kebiasaan yang buruk. Terutama kepada masyarakat yang melakukan perubahan akad utang piutang guna jaminan pelunasan utang yang mana praktik ini terdapat pemanfaatan barang jaminan dan itu hukumnya dilarang menurut Islam. Maka untuk para pihak yang melakukan akad tersebut untuk tidak lagi melanjutkan praktik tersebut sebab ada dalil yang mengharamkannya.
2. Bagi tokoh Agama Islam yang terdapat di Desa Talang Jawa, harus bisa lebih berusaha lagi untuk berdakwah dan menyi'arkan ajaran Agama Islam dalam lingkungan masyarakat mengenai praktik-praktik transaksi yang baik dan benar tanpa melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan menurut syara'.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafe'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* , Jakarta: Gema Insan, 2001
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Ahmad Awrdis Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ascarya , *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Renika Cipta, 2013
- Atha' bin Khalil, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2008
- Arikanto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Al-Fauzan Shaleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi Jilid 6*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqih al-Islami wa Adillah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 2004
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah* , Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Cet ke-3, Jakarta : UII Pers, 2009
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang Dan Gadai*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1983
- Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Dahlan, Abdul Aziz, *ed ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Toha Putra Semarang, 1971

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006

Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Penada Media Group, 20012

Eka Nuraini Rachmawati Dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesi*, Al-Adalah, Vol.12, No.4, Desember, 2015 (On-Line) tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214> (10 April 2019, pukul 20.00), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Fatwa Dewan Nasional-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 *Utang Piutang*

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003

Huda Nurul & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2010

Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015

Ihsan Bakir, *perjanjian pinjam meminjam*, Ahkam: jurnal ilmu syariah, Vol 17, No.2, November, 2017

Khotibul Umam Dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* ,Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Madjid Abdul, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung: Rajawali, 1986

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Grou, 2012

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Juz 2, Nomor Hadis 2374*, CD Room: Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-Ilm An-Nafi, Seri 4, Al-Iskandar Al-Awwal, 1426

- Muhammad Abdulkadi, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Cintra Aditya Bakti, 2014
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Teuku, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011
- Muslich, Ahmad Awradi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Nazir Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Pabundu Tika Moh., *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: PT Balai Pustaka, 2017
- Rohman Abdur, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing*, Al-Adalah Vol. XIII, No. 2, Desember, 2016 (On-Line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1856> (10 April 2019, pukul 20.30), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Wali, 2017
- Sjahdeini, Sutan Remy, *perbankan syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014
- Sholihin, Ahmad Irham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2010
- Supramono Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2014
- Syaikh Abdul Al-Fauzan, *Minhah Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram*, Bairut: Dar Ibnul Jauzi, 1432H
- Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000